

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Ni Made Itarini<sup>1</sup>  
Ni Putu Wiwin Setyari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [nimadeitarini@gmail.com](mailto:nimadeitarini@gmail.com) / Telp: 08123763953

### ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membawa implikasi kepada pemerintahan daerah. Keadaan ini semakin memperkuat tekanan kepada keuangan daerah karena dengan pemberlakuan desentralisasi sumbangan pemerintah pusat berkurang. Pemerintahan daerah diperlukan kesiapan dana yang relatif cukup besar yang dapat digali potensinya dari retribusi daerah. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan secara simultan terhadap retribusi daerah, (2) menganalisis pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan secara parsial terhadap retribusi daerah, (3) menganalisis pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah, dan (4) menganalisis trend retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dari tahun 2019-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 72 pengamatan, yang dianalisis dengan teknik analisis moderasi dan analisis tren. Jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan berpengaruh positif terhadap retribusi daerah. Jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas dan jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah, jumlah penduduk memperlemah hubungan jumlah ternak yang dipotong terhadap retribusi daerah. Trend retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali meningkat dari tahun 2019-2023.

**Kata Kunci:**Retribusi Daerah, Rumah Sakit dan Puskesmas, Ternak yang Dipotong, Kendaraan Bermotor, Penduduk

### ABSTRACT

*The policy of regional autonomy and fiscal decentralization has implications for regional government. This situation further strengthens on regional finances of the central government is reduced. Regional government needs a relatively large amount of fund readiness that can be extracted from the potential of local levies. The purpose of this study was (1) to analyze the effect of number of hospitals and health center, the number of cattle slaughtered, and the number of vehicles simultaneously on regional levies, (2) analyzing the effect of number hospitals and health center, the number of cattle slaughtered, and the number of vehicles partially on regional user fees, (3) analyzing the influence of the population in moderating the influence of the number of hospitals and health centers, the number of cattle slaughtered, and the number of vehicles on regional user fees, and (4) analyzing the trend of regional user fees in Bali Province / City from 2019- 2023. The data used are secondary data with 72 observations, analyzed by moderation and trend analysis. The number of hospitals and health center, the number of cattle slaughtered, and the number of vehicles have a positive effect on local user fees. The population is not able to moderate the effect of the number of hospitals and health centers and the number of vehicles on local user fees, the population weakens the relationship of the number of cattle slaughtered against local user fees. The trend of regional retribution in districts / cities of Bali Province increased from 2019-2023.*

**Keywords:** Regional Retribution, Hospitals and Health Centers, Slaughtered Cattle, Motorized Vehicles, Population

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan rencana strategis yang diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan menyeimbangkan laju pertumbuhan antar daerah sesuai prioritasnya dalam meningkatkan pendayagunaan dan potensi daerah secara optimal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah pada era otonomi daerah, salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah adalah dengan menggali sumber penerimaan daerah melalui retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Menurut Uppun (2016) otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, menentukan prioritas dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fungsi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah.

Retribusi daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan APBD terhadap perekonomian akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memegang peran penting pada pembentukan sumber pendapatan asli daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan retribusi yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besar kecilnya penerimaan retribusi daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pungutan retribusi daerah. Setiap tahun didalam anggaran pemerintahan daerah, ditetapkan target penerimaan retribusi daerah yang harus dicapai. Pencapaian target retribusi daerah akan menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan daerah tersebut.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Menurut Umberger (2015) pasar memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan retribusi daerah. Retribusi daerah di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari; (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu (BPS Provinsi Bali, 2013).

Retribusi jasa umum di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan retribusi pengujian kapal perikanan (BPS Provinsi Bali, 2013).

Retribusi jasa usaha di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesinggahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. dan retribusi perizinan tertentu di setiap kabupaten/kota provinsi bali berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek (BPS Provinsi Bali, 2013).

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja (Kurniasih, 2009).

Dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang kesehatan, yang masuk didalam retribusi daerah. Ratwono (2008) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian Ratwono (2008) jumlah rumah sakit dan puskesmas berpengaruh positif signifikan terhadap retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang ada di suatu daerah ini sangat penting bagi manusia dan juga bagi pemerintah (dalam meningkatkan retribusi daerah).

Bali merupakan salah satu daerah yang unik dan terkenal dengan adat istiadatnya, kegiatan budaya masih sangat aktif dilakukan oleh masyarakat Bali, yang di mana setiap upacara ini pasti melibatkan hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan

ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah. Tingkat pengguna jasa dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong, fasilitas dan pelayanan/ jasa yang diberikan (Pasal 6 Perda Nomor 26 Tahun 2011). Menurut Firman (2009) dalam penelitiannya analisis sub sektor peternakan dalam pendapatan asli daerah kabupaten Wajo menyatakan bahwa jumlah ternak yang dipotong berpengaruh terhadap retribusi daerah.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah (BPS, 2013). Ratwono (2008) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian Ratwono (2008) jumlah kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penerimaan retribusi daerah karena dengan melihat pada jumlah kendaraan tentu akan memberikan peluang untuk pemungutan retribusi misalnya pada retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi ijin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rosalina, 2015).

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Suyatmo (2011) meneliti pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah jamkesmas terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Pertumbuhan

penduduk yang terus meningkat beriringan dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani (Putra, 2017). Upaya yang dilakukan oleh bidang sub sektor peternakan adalah meningkatkan sumber daya yang menghasilkan protein hewani semaksimal mungkin.

Jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan merupakan salah satu sumber retribusi daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Peningkatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penyusun PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya (Setiyawati 2007). Seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga daerah maka sumber-sumber tersebut didapat dari pendapatan asli daerah.

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2011	133.346.755.011,00	1.723.807.096.000,00	7,736
2012	159.400.177.012,00	2.042.091.096.000,00	7,806
2013	212.582.872.013,00	2.529.976.147.000,00	8,403
2014	255.437.831.014,00	2.920.416.697.000,00	8,747
2015	267.093.904.015,00	3.041.266.607.000,00	8,782
2016	313.996.739.016,00	3.041.195.258.000,00	10,325
2017	308.447.163.000,00	3.398.472.278.000,00	9,078
2018	359.578.205.000,00	3.718.499.635.000,00	9,670

**Tabel 1.1 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2011-2018**

*Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Penurunan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD disebabkan karena menurunnya retribusi perizinan tertentu yaitu pada komponen penerimaan Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Perlu langkah-langkah yang efektif dan efisien diikuti kebijakan tegas agar pendapatan dapat tercapai optimal (Pastika, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan secara simultan terhadap retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan secara parsial terhadap retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (3) menganalisis pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (4) menganalisis trend retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dari tahun 2019-2023.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali yang diakses melalui Badan Pusat Statistik kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, jumlah kendaraan, jumlah penduduk, dan retribusi daerah. *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 23 dalam mengukur pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan terhadap retribusi

daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan trend retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dari tahun 2019-2023. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung sebagai pengamat independent. Data diakses dari BPS kabupaten/kota Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2011-2018.

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis moderasi dan analisis tren. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, menggunakan rumus *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu:

$$\hat{Y}_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 Z_{it} + \beta_5 X_{1it} Z_{it} + \beta_6 X_{2it} Z_{it} + \beta_7 X_{3it} Z_{it} + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- $\alpha$  = Konstanta
- Y = Retribusi Daerah
- $X_1$  = Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
- $X_2$  = Jumlah Ternak yang Dipotong di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
- $X_3$  = Jumlah Kendaraan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
- Z = Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
- $\beta_1$  = Koefisien regresi dari Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas ( $X_1$ )
- $\beta_2$  = Koefisien regresi dari Ternak yang Dipotong ( $X_2$ )
- $\beta_3$  = Koefisien regresi dari Jumlah Kendaraan ( $X_3$ )
- $\beta_4$  = Koefisien regresi dari Jumlah Penduduk ( $X_5$ )

$\beta_5$  = Koefisien regresi dari Interaksi Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas dan Jumlah Penduduk ( $X_1Z$ )

$\beta_6$  = Koefisien regresi dari Interaksi Jumlah Ternak yang Dipotong dan Jumlah Penduduk ( $X_2Z$ )

$\beta_7$  = Koefisien regresi dari Interaksi Jumlah Kendaraan dan Jumlah Penduduk ( $X_3Z$ )

e = Error

Analisis trend adalah pendekatan dengan menggunakan perbandingan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu (*Times Series*) :

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = nilai trend periode tertentu = nilai peramalan periode tertentu

a = konstanta

b = koefisien arah garis trend = perubahan trend setiap periode

X = unit periode yang dihitung dari periode dasar

adalah variabel dependen (terikat) yang dicari trendsnya

Jika trend baik maka dapat diasumsikan bahwa retribusi daerah relatif baik dan begitu pula sebaliknya (Tran Van, 2003). Menurut Yacob Ibrahim (2003) Trend adalah satu peralatan statistik yang dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Jadi dapat disimpulkan, analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.2 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0105560
	Std. Deviation	.53524213
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.049
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp sig 2-tailed* uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 1.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.048	21.021
X2	.168	5.944
X3	.015	65.005
Z	.016	62.468
X1Z	.010	96.021
X2Z	.091	11.007
X3Z	.011	90.245

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 1.3, koefisien *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10. Hal ini berarti bahwa model regresi yang dibuat terdapat gejala multikolinieritas. Menurut Utama (2016;153) regresi dengan variabel interaksi umumnya akan menimbulkan masalah, karena akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antara variabel independen, seperti pada variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas ( $X_1$ ) dan interaksi jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan jumlah penduduk ( $X_1Z$ ), jumlah ternak yang dipotong ( $X_2$ ) dan interaksi jumlah ternak yang dipotong dengan jumlah penduduk ( $X_2Z$ ), dan jumlah kendaraan ( $X_3$ ) dengan variabel interaksi jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk ( $X_3Z$ ). Hal ini disebabkan pada variabel moderasi terdapat unsur dari variabel independen dan variabel moderasi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 1.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.184	.241
	X1	-1.686	.097
	X2	-.214	.832
	X3	2.001	.050
	Z	.185	.854
	X1Z	1.067	.290
	X2Z	-1.444	.154
	X3Z	-1.604	.114

a. Dependent Variable: ABRES

Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas ( $X_1$ ), jumlah ternak yang dipotong ( $X_2$ ), jumlah kendaraan ( $X_3$ ), jumlah penduduk ( $Z$ ), variabel interaksi  $X_1Z$ ,  $X_2Z$ ,

dan  $X_3Z$ . memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 1.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738 <sup>a</sup>	.544	.458	17.106802

a. Predictors: (Constant),  $X_3Z$ ,  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Z$ ,  $X_2Z$ ,  $X_3$ ,  $X_1Z$

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS, terlihat bahwa koefisien determinasi atau  $R^2 = 0,544$  memiliki arti bahwa 54,4 persen variasi dari retribusi daerah mampu dijelaskan oleh variasi jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, jumlah kendaraan, variabel interaksi jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan jumlah penduduk, variabel interaksi jumlah ternak yang dipotong dengan jumlah penduduk dan interaksi jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk, sedangkan 45,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

**Tabel 1.6 Uji Simultan atau Uji Anova atau Uji F Test**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12930.988	7	1847.284	6.312	.000 <sup>b</sup>
	Residual	10827.779	37	292.643		
	Total	23758.767	44			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant),  $X_3Z$ ,  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Z$ ,  $X_2Z$ ,  $X_3$ ,  $X_1Z$

Berdasarkan Tabel 1.6 secara simultan variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan berpengaruh nyata terhadap retribusi daerah pada *level of significant* 5 persen, hal ini dapat dilihat nilai F hitung sebesar 6,312 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai F tabel pada derajat bebas (7;64) adalah 2,10 (6,312 > 2,10). Ini berarti bahwa H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, yang berarti variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan berpengaruh secara serempak terhadap retribusi daerah.

**Tabel 1.7 Uji Signifikansi Variabel Moderasi**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-90.697	56.126		-1.616	.115
	X1	.050	.086	.413	.575	.569
	X2	.115	.042	.930	2.765	.009
	X3	.106	.051	2.947	2.083	.044
	Z	.354	.148	3.305	2.387	.022
	X1Z	-.245	.236	-1.756	-1.038	.306
	X2Z	-.254	.079	-1.613	-3.197	.003
	X3Z	-.203	.108	-3.162	-1.888	.067

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 7

Adapun persamaannya secara matematis sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 Z_{it} + \beta_5 X_{1it} Z_{it} + \beta_6 X_{2it} Z_{it} + \beta_7 X_{3it} Z_{it} + \mu$$

$$\hat{Y}_{it} = -90,697 + 0,050X_{1it} + 0,115X_{2it} + 0,106X_{3it} + 0,354Z_{it} - 0,245X_{1it}Z_{it} - 0,254X_{2it}Z_{it} - 0,203X_{3it}Z_{it} + \mu$$

$$\text{Sig} = \quad 0,569 \quad 0,009 \quad 0,044 \quad 0,022 \quad 0,306 \quad 0,003 \quad 0,067$$

### **Peran Jumlah Penduduk dalam Memoderasi Pengaruh Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Terhadap Retribusi Daerah**

Berdasarkan Tabel 1.7 variabel jumlah penduduk dengan nilai koefisien positif 0,354 dan tingkat signifikan 0,022 dan koefisien variabel interaksi  $X_1Z$  memiliki koefisien yang negatif sebesar -0,245 dan tidak signifikan pada 0,306, yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil output interaksi jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas terhadap retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan yang telah diungkapkan dalam teori bahwa dilihat dari apapun nilai  $\beta_4$  (signifikan atau tidak, positif atau negatif) asalkan  $\beta_5$  signifikan berarti berarti jumlah penduduk merupakan variabel moderasi, namun karena  $\beta_5$  dalam pengujiannya ditemukan tidak signifikan maka jumlah penduduk tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyatmo (2011) menunjukkan bahwa jamkesmas memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap retribusi pelayanan kesehatan. Mayoritas penduduk Bali menggunakan jamkesmas untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas (pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) dan rumah sakit (pelayanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut). Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Pasal 4 tentang retribusi pelayanan kesehatan, bahwa bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung pemerintah dalam program jamkesmas atau pemerintah kota dalam program jamkesda seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah (APBN)

dan/atau pemerintah daerah (APBD). Banyaknya masyarakat yang tidak memeriksakan kesehatannya secara berkala mengakibatkan jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah rumah sakit dan puskesmas terhadap retribusi daerah di Provinsi Bali. Rumah sakit dan puskesmas tidak hanya diperuntukkan untuk orang sakit namun juga orang yang sehat untuk memeriksakan kesehatannya, sehingga dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Bali dapat memicu masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala dengan melihat rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Indonesia (Departemen Kesehatan, 2013).

#### **Peran Jumlah Penduduk dalam Memoderasi Pengaruh Jumlah Ternak yang Dipotong Terhadap Retribusi Daerah**

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan interaksi jumlah ternak yang dipotong dengan jumlah penduduk merupakan variabel moderasi semu, artinya meskipun jumlah penduduk meningkat, retribusi daerah akan meningkat dengan meningkatnya jumlah ternak yang dipotong. Hal ini sejalan dengan yang telah diungkapkan dalam teori bahwa dilihat dari apapun nilai  $\beta_4$  (signifikan atau tidak, positif atau negatif) asalkan  $\beta_6$  signifikan berarti berarti jumlah penduduk merupakan variabel moderasi, namun karena  $\beta_6$  dalam pengujiannya ditemukan signifikan maka jumlah penduduk berperan sebagai variabel moderasi.

Koefisien interaksi  $X_1Z$  memiliki koefisien yang negatif sebesar -0,254 dan signifikan pada 0,003 berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak dan dapat diinterpretasikan, bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka pengaruh

jumlah ternak yang dipotong terhadap retribusi daerah menjadi menurun. Dengan kata lain, jumlah penduduk memperlemah pengaruh jumlah ternak yang dipotong terhadap retribusi daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Isyanto, dkk (2018) bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap populasi sapi potong. Koefisien regresi bertanda negatif menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan menurunkan populasi sapi potong.

Penelitian Masniadi (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan penurunan pendapatan per kapita. Penelitian Fadlillah, dkk. (2016) menunjukkan bahwa penurunan pendapatan per kapita mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Menurut Rejekiingsih (2011), salah satu ciri penduduk miskin adalah pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan penurunan pendapatan per kapita yang menyebabkan peningkatan pada jumlah penduduk miskin yang berpendapatan rendah sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini akan menurunkan permintaan terhadap daging sapi yang berdampak pada penurunan populasi sapi potong. Menurut Handayani, dkk. (2016), daging sapi bagi masyarakat Indonesia masih merupakan barang mewah, sehingga konsumen daging sapi adalah golongan menengah ke atas yang tidak berpengaruh dengan perubahan harga.

### **Peran Jumlah Penduduk dalam Memoderasi Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Retribusi Daerah**

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dengan nilai koefisien positif 0,354 dan tingkat signifikan 0,022 dan koefisien variabel

interaksi  $X_2Z$  memiliki koefisien yang negatif sebesar -0,203 dan tidak signifikan pada 0,067 yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Interaksi jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan yang telah diungkapkan dalam teori bahwa dilihat dari apapun nilai  $\beta_4$  (signifikan atau tidak, positif atau negatif) asalkan  $\beta_7$  signifikan berarti jumlah penduduk merupakan variabel moderasi, namun karena  $\beta_7$  dalam pengujiannya ditemukan tidak signifikan maka jumlah penduduk tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.

Peningkatan jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena tidak semua kendaraan yang ada di Provinsi Bali mengikuti pengujian kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2016), menunjukkan bahwa dari 1686 jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian kendaraan bermotor, hanya 1524 yang dinyatakan lulus uji dan 162 dinyatakan tidak lulus uji. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017 di provinsi Bali sebanyak 3.725 unit, dari jumlah kendaraan bermotor tersebut hanya 1686 yang mengikuti pengujian kendaraan bermotor, sehingga 2039 unit kendaraan bermotor yang tidak mengikuti pengujian kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Bali dinyatakan tidak semua kendaraan telah mengikuti pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, banyaknya kantong parkir yang masih dikelola oleh pihak swasta juga menyebabkan pos penerimaan dari parkir ke daerah menjadi rendah. Selain itu juga disebabkan oleh banyaknya terminal yang sudah tidak aktif seperti terminal

di Batubulan Gianyar yang saat ini sudah dipenuhi pedagang yang berjualan di terminal.

Menurut Gama Putra (2019) bahwa pemberian informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 masih minim hal itu terbukti pada jawaban pengemudi yang tidak tahu mengenai aturan tersebut. Ketegasan sanksi yang diberikan juga masih sangat lemah dan belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan regulasi pada pengujian kendaraan bermotor.

Uji signifikansi secara parsial (uji t) berdasarkan Tabel 1.7 yaitu:

#### **Pengaruh Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Terhadap Retribusi Daerah**

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 1.7 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah rumah sakit dan puskesmas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap retribusi daerah, dimana koefisien jumlah rumah sakit dan puskesmas ( $X_1$ ) bernilai 0,050 dengan tingkat signifikansi 0,569. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyatmo (2011) menunjukkan bahwa jamkesmas memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap retribusi pelayanan kesehatan. Mayoritas penduduk Bali menggunakan jamkesmas untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas (pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) dan rumah sakit (pelayanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut).

Pelayanan kesehatan masih belum tersebar merata di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan pelayanan yang ada di desa dan kota. Pelayanan kesehatan justru lebih banyak terdapat di kota dari pada di desa. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang memiliki jumlah rumah sakit

dan puskesmas terendah di Provinsi Bali dibandingkan kabupaten lainnya terutama jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas kesehatan di pusat kota yaitu di Kota Denpasar. Di wilayah desa fasilitas pelayanan kesehatan tidak seperti yang ada di kota. Pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan masih termasuk belum dapat melayani dengan baik. Karena adanya kurang tenaga medis, alat-alat kesehatan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Ketersediaan pelayanan kesehatan juga belum memuaskan karena ketersediaan obat dan alat medis yang kurang memadai di puskesmas pedesaan. Sehingga, layanan yang diberikan tidak dapat membuat konsumen atau masyarakat merasa puas.

#### **Pengaruh Jumlah Ternak yang Dipotong Terhadap Retribusi Daerah**

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 1.7 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah ternak yang dipotong ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,115 pada tingkat signifikansi 0,009. Hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah ternak yang dipotong terhadap retribusi daerah sesuai dengan penelitian Nuraini dan Effendi (2019). Sebagai sumber penerimaan retribusi rumah potong hewan sangat penting guna mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah dan PAD, dengan demikian diharapkan akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Bali.

#### **Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Retribusi Daerah**

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 1.7 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah kendaraan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah dengan koefisien jumlah kendaraan ( $X_3$ ) bernilai 0,106 dengan tingkat signifikansi 0,044. Hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah sesuai dengan penelitian Ratnowo (2008) dan Rosalina (2015). Variabel jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah sangat responsif terhadap perubahan jumlah kendaran bermotor.

Variabel jumlah kendaraan memberikan dukungan bagi pos pungutan retribusi yang berhubungan dengan jumlah kendaraan, seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat parkir dan retribusi ijin trayek. Peningkatan dari jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perekonomiannya sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan infrastruktur jasa terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ini memberikan indikasi yang baik bagi pemerintah provinsi Bali dalam menggali potensi dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dapat dijadikan pemacu bagi pemerintahan daerah provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat terutama bagi ketersediaan obyek retribusi yang ada, sehingga penerimaan retribusi dapat dioptimalkan.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Retribusi Daerah**

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 1.7 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah dengan koefisien

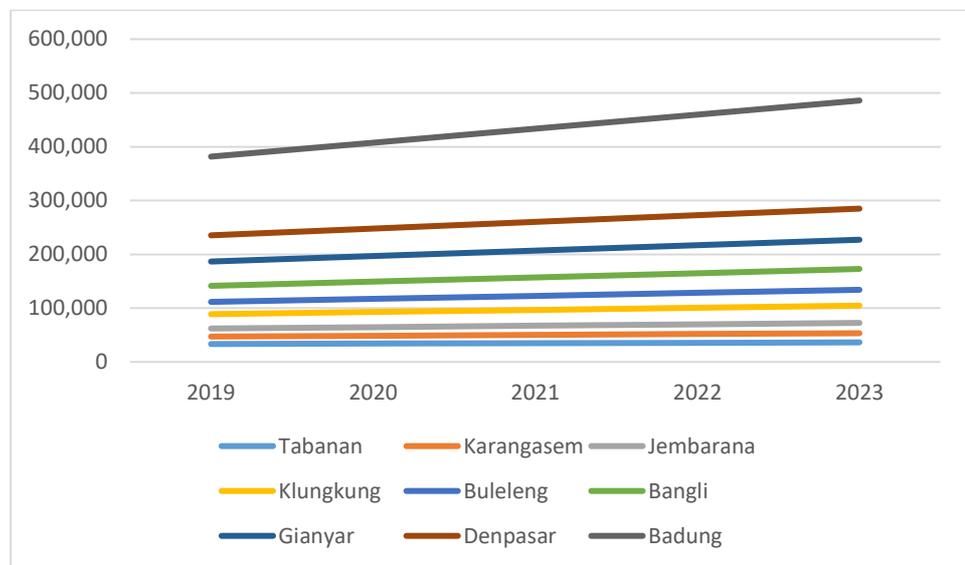
jumlah penduduk (Z) bernilai 0,354 dengan tingkat signifikansi 0,022. Hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah penduduk terhadap retribusi daerah sesuai dengan penelitian Masrofi (2004) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Abdul Halim (2001) besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

#### **Trend (Kecenderungan) Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Untuk menguji apakah ditahun-tahun yang akan datang retribusi daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali mempunyai kecenderungan meningkat ataupun menurun akan diuji dengan analisis trend. Metode kuadrat terkecil paling umum dan lebih baik untuk menentukan garis trend. Prinsip dari cara kuadrat terkecil yaitu meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan (selisih) nilai variabel bebas ( $Y_i$ ) dengan nilai trend/nilai ramalannya. Pengolahan data menggunakan program SPSS, menghasilkan persamaan sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Jembrana  $Y' = 9,809 + 1,048X$
- 2) Kabupaten Tabanan  $Y' = 29,471 + 0,763X$
- 3) Kabupaten Badung  $Y' = 77,968 + 13,670X$
- 4) Kabupaten Gianyar  $Y' = 33,871 + 2,266X$
- 5) Kabupaten Klungkung  $Y' = 19,890 + 1,352X$
- 6) Kabupaten Bangli  $Y' = 18,697 + 2,230X$

- 7) Kabupaten Karangasem  $Y' = 9,886 + 0,789X$
- 8) Kabupaten Buleleng  $Y' = 14,454 + 1,667X$
- 9) Kota Denpasar  $Y' = 37,298 + 2,280X$



Sumber : data diolah dari data tren

**Gambar 4.1 Tren Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa ramalan tren retribusi daerah Kabupaten Badung memiliki rata-rata peningkatan pendapatan per kapita tertinggi diantara kabupaten/kota yang lain, dengan peningkatan sebesar Rp. 13,67 milyar per tahun, karena pusat akomodasi di Provinsi Bali berada di Kecamatan Kuta selatan yang melingkupi wilayah Jimbaran dan Nusa Dua. Peningkatan retribusi terendah yaitu di Kabupaten Tabanan diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Ramalan tren retribusi daerah di Kabupaten Tabanan meningkat hanya sebesar Rp. 0,763 milyar per tahun, namun apabila Kabupaten Tabanan dapat meningkatkan sumber penerimaan retribusi daerah, maka ramalan tren retribusi

daerah bisa lebih tinggi dari hasil proyeksi. Begitupun dengan Kabupaten Badung akan tetap menjadi kabupaten dengan retribusi daerah tertinggi di masa depan, jika dapat mempertahankan sumber penerimaan retribusi daerah di daerahnya. Ramalan tren retribusi daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kecenderungan meningkat dengan asumsi jumlah rumah sakit dan puskesmas meningkat, jumlah ternak yang dipotong meningkat, dan jumlah kendaraan meningkat.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.
2. Jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah ternak yang dipotong, dan jumlah kendaraan secara parsialberpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.
3. Jumlah penduduk tidak mampu memoderasi jumlah rumah sakit dan puskesmas dan jumlah kendaraan terhadap penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Namun, jumlah penduduk memperlemah pengaruh jumlah ternak yang dipotong terhadap retribusi daerah.
4. Tren (kecenderungan) retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali mengalami peningkatan di tahun 2019-2023, dengan asumsi jumlah rumah

sakit dan puskesmas meningkat, jumlah ternak yang dipotong meningkat, dan jumlah kendaraan meningkat.

### **Saran**

1. Pemerintah dan dinas kesehatan diharapkan dapat lebih memperhatikan upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran penduduk untuk hidup sehat dengan memeriksakan kesehatannya dan mengubah paradigma sakit yang sudah lama berkembang dimasyarakat menjadi paradigma sehat, dimana rumah sakit dan puskesmas bukan hanya untuk orang yang sakit tetapi juga orang yang sehat seperti dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan rutin di masyarakat.
2. Memperkuat sanksi yang diberikan dan menerapkan secara maksimal sesuai dengan regulasi dalam pengujian kendaraan bermotor. Mewajibkan penempelan stiker atau tanda pada setiap kendaraan yang telah mengikuti uji kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan agar kendaraan khususnya transportasi *online* seperti gojek dapat rutin melakukan pengujian kendaraannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebaiknya mengembangkan sumber-sumber penerimaan retribusi di daerahnya sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerah Karangasem.
3. Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem sebaiknya mengoptimalkan peran retribusi rumah potong hewan di daerahnya, karena Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana merupakan daerah pusat pengembangan sapi di Provinsi Bali. Ternak yang dipotong seperti sapi sebaiknya dipotong di rumah pemotongan hewan daerahnya kemudian daging

hasil pemotongan hewan yang dijual ke daerah-daerah lain.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat StatistikProvinsi Bali. Bali Dalam Angka 2013 <http://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Agustus 2017
- Bratamanggala, Rudi. 2017. *Implications of Tax Receivables and Retribution for the Economic Growth of Indonesia*. *European Research Studies Journal*. Volume XX, Issue 3A, 2017
- Chatterjee, Santanu. 2005. *Capital Utilization, Economic Growth and Convergence*. *Journal of Economic Dynamics & Control*, 29, pp 2093-2124.
- Davey. 1988. *Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta:UI.
- Ekanayake. E.M and Aubrey E. Long. 2012. *Tourism Development and Economic Growth In Developing Countries*. *The International Journal of Business and Finance Research*, Volume 6, Number 1.
- Fadlillah, N., Sukiman, dan Dewi, A.S. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Eko-Regional*, 11(1): 18-26.
- Fajrii, Muhammad dan Arman Delis,dkk. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.],Agustus 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/27422>> . Date accessed: 30 Agustus 2019.
- Ghosh, Partha Pratim, Arpita Dhar and Debesh Chakraborty. 2008. *Government Finances and Economic Growth: A Policy Perspective on the Developing Economy of Sri Lanka*. *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 15, No. 2.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Delapan). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurluk, Serkan. 2009. *Economic Growth, Industrial Pollution and Human Development in the Mediterranean Region*. *Ecological Economics*, 68, pp 2327-2335.
- Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black. (1995). *Multivariate Data Analysis with Readings (Fourth Edition)*. New Jersey, USA : Prentice-

Hall International, Inc.

Herranz, Alfonso-Loncan. 2007. *Infrastructure Investment and Spanish Economic Growth, 1850-1935. Exploration In Economic History*, Vol. 44, pp 452-468.

Ihlanfeldt, K. R. & Willardsen, K., 2014. *The millage rate offset and property tax revenue stability. Regional Science and Urban Economics*, May, Volume 46, pp. 167-176

Irawan, Andi . 2015 *Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51: 1, 148-149.

Isyanto, Agus Yuniawan, Sudrajat, Dedi Herdiansah Sujaya, Mochamad Remdan, Saepul Aziz. 2018. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Populasi Sapi Potong di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

Kaur, Manjinder dan Lakhwinder Singh. 2016. *Knowledge In The Economic Growth Of Developing Economies. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*. Volume 8 Issue 2.

Kresnandra, A.A. Ngurah Agung dan Erawati, Ni Made Adi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3 (2013):544-560

Kurniawan, Robi & Managi, Shunsuke. 2018. *Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3, 2018: 339–361

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.

Masniadi, R.2012. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1): 68-80.

Nuraini dan Effendi, Isnain. 2019. Analisis Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Sains*. Vol 4 No 2 pp. 292-297

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

- Putra, Yogi Eska. 2017. Struktur dan Dinamika Populasi Ternak Sapi Potong di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. *Universitas Andalas*. Payakumbuh
- Putri, Trisnayani, I Gusti Ayu Yuliasitini, dan Ni Nyoman Rupiasih. 2016. Pemantauan Kualitas Udara Melalui Uji Emisi Di Provinsi Bali. *Prosiding Sainstech*. Pp 150-156
- Permadi, Yudistira Andi. 2018. *Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 11 No. 2.
- Rantetadung, Romario. 2019. Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 14 (1)
- Ratwono, Andika Budi. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta. *Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB*. Bogor.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh .2012. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*,Vol 6.Nomor 2
- Rosalina, Elly. 2015. Analisis Pengaruh dan Kontribusi Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus. *Economics Development Analysis Journal*. Vol 4 No 1.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2.
- Santoso, S. (1999). *SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Saputra, Deny. 2014. Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Retribusi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang). *Jurnal Akuntansi FE Umrah*
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 1 Februari 2017. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/issue/view/2412>>. Data accessed: 1 September 2019.

- Setiyawati, Anis. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 4 No.2 Hal: 211-228
- Sidik, Machfud. 1999. *Indonesia Antara akumulasi krisis dan Tuntutan Reformasi*. Jakarta: LP3NI.
- Sinclair, M Thea. 1998, *Tourism and economic development: A survey, The Journal of Development Studies* 34.5
- Sriparno. 2015. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 13 No 2
- Suartha, Nyoman dan Murjana Yasa I.Gst Wayan. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Februari 2017.
- Suartha, Nyoman. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. *Piramida*. Vol. XII No. 1 : 1 - 7
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.(2013) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_.(2017). *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1999. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Suyana Utama, Made. 2016. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: CV Sastra Utma
- Suyatmo. 2011. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Jamkesmas Terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009. *Digilib UNS*. Hal 93
- Syari, Dessy Dian dan Syamsurijal A K. 2017. *The Effect Of Fiscal Decentralization To Gross Domestic Regional Product Of District / City In South Sumatra Province*. *SIJDEB*, 1(2), 2017, 181-202

- Taufik, Muhammad. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7 No 2. Agustus 2014. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/issue/view/1629>>. Data accessed: 1 September 2019
- Umberger, Wendy J. 2015. *Market-Channel Choices of Indonesian Potato Farmers: A Best–Worst Scaling Experiment*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015: 461–77
- Uppun, Paulus. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan KB Dan Pengendalian Kelahiran Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Piramida*. Vol. XII No. 2 : 59 - 71
- Wantara, Agus. 2015. Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (1990–2012). *Kinerja*. Vol 19 No 1
- Wirawan. Dewa Nyoman. 2013. Ledakan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bali dan Solusinya. PHPMA. Volume 1 No 2
- Wong, John D., 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423.